



Kepentingan Ekonomi Dibalik Respon Pemerintah Cina Terhadap *United State Trade Representative (USTR) Notorious Markets List* Tahun 2016–2018

Ananda Fitria Trisnawati

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The United States and China are the two largest economic powers in the world today. The relationship between the two countries always change from time to time in accordance with the circumstances. Despite the cooperation in various fields, concerns and disputes remain inevitable. One of the disputes between the two countries is the protection of intellectual property rights. The dispute is more or less due to differences in the application of intellectual property rights protection regimes in each country. The United States had implemented the intellectual property protection regime long ago before China implemented the intellectual property protection regime. The United States institution in charge of handling this matter is the United State Trade Representative (USTR). USTR gave its recommendations through the Notorious Markets List which then often targets the largest e-commerce from China, Taobao which is a subsidiary of the Alibaba Group. This study then aims to analyze the reasons behind the response given by the Chinese government to the USTR's Notorious Markets List, especially in 2016-2018. These factors will be analyzed using the concept of national interest. This research argues that the response given by the Chinese government to USTR's 2016 Notorious Markets List is not only about the intellectual property agenda but there is an economic interest behind it.

Keywords : *China, United States, USTR, IPR Protection, National Interest*

PENDAHULUAN

Cina merupakan salah satu negara yang paling terlihat mengalami kemajuan di bidang ekonomi pada saat ini. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup signifikan mengingat kondisi perekonomian Cina yang dahulu tergolong sangat kurang. Pada awal tahun 1990-an, Cina semakin giat meningkatkan perekonomiannya dengan mulai merambah ke sektor *e-commerce*. Menurut (Hongfei, 2017) dalam *National Report on E-commerce Development in China* dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), internet mulai masuk ke Cina pada tahun 1994, dan dalam 20 tahun terakhir, telah menembus industri dan sektor komersial di Cina. Perubahan mendasar yang dibawa oleh Internet telah tergabung dalam operasi pasar industri tradisional, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, sektor *e-commerce* Cina telah menunjukkan momentum pertumbuhan yang eksplosif. Hingga kemudian, meskipun pada tahun 2008 *e-commerce* Cina semakin mengalami pertumbuhan pesat, muncul hambatan dari negara lain yaitu Amerika Serikat.

Kantor *United State Trade Representative* (USTR) mengeluarkan daftar “Notorious Market” dimana daftar tersebut memuat beberapa pasar di Cina, baik pasar online maupun pasar fisik. *USTR Notorious Market List* merupakan daftar yang berisi pasar yang terlibat

maupun memfasilitasi kegiatan pemalsuan merek dagang (*trademark counterfeiting*) dan pembajakan hak cipta (*copyright piracy*) baik berupa pasar fisik (*physical marketplace*) maupun pasar online (*online marketplace*). Salah satu dari pasar yang terlibat yaitu Taobao.com yang merupakan bagian dari Alibaba Group yang merupakan perusahaan *e-commerce* terdepan di Cina dan memberikan keuntungan ekonomi kepada Cina melalui praktik *e-commerce* mereka tersebut.

Kemudian pada Tahun 2012, Taobao dikeluarkan dari daftar “Notorious Market” tersebut. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 Taobao kembali muncul dalam daftar tersebut. Hal ini berarti Taobao masuk ke dalam daftar “Notorious Market” dalam 2 tahun setelah terbit sejak 2012. Daftar yang dikeluarkan oleh USTR tersebut merupakan rekomendasi dan bukan merupakan bukti pelanggaran hukum yang sah. Meskipun begitu, Pemerintah Cina secara konsisten memberikan responnya terhadap daftar tersebut.

Penelitian ini kemudian akan berusaha untuk menjelaskan faktor yang mendorong pemerintah Cina memberikan responnya terhadap daftar “Notorious Market” milik USTR berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan pada kurun waktu tahun 2016 – 2018. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan alasan (*reasoning*), motivasi, atau justifikasi utama yang mendasari perilaku suatu negara dalam lingkungan global (Bakry, 2017). Kepentingan nasional juga dapat didefinisikan sebagai “*what a nation feels to be necessary to its security and well being ... National interest reflects the general and continuing ends for which a nation acts*” (Brookings Institution, 1953). Menurut (Holsti, 1992), kepentingan nasional dapat dibagi menjadi tiga yaitu nilai inti (*core values*), tujuan jangka menengah (*middle range objectives*), dan tujuan jangka panjang (*long range objectives*). Penelitian ini kemudian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kepentingan ekonomi Cina sesuai dengan tipologi dari Holsti tersebut.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Digital Sebagai Instrumen Utama Kepentingan Ekonomi Cina

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kepentingan ekonomi Cina merupakan bentuk dari kepentingan nasional primer atau vital. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri, Cina selalu memprioritaskan kepentingan ekonominya. Menurut (Peterson Institute for International Economics, c.6, p.77), kemajuan ekonomi Cina yang luar biasa mencerminkan suatu keputusan berani yang diambil pada awal 1990-an untuk membuka dan melakukan modernisasi pada sektor ekonominya, yang mengarah ke reformasi pasar utama dan akses ke WTO.

Kepentingan ekonomi sebagai kepentingan nasional primer ini juga terlihat pada keinginan Cina untuk mengembalikan Cina ke posisi global sebelumnya tepatnya pada tiga ratus tahun yang lalu. Waktu tersebut merupakan waktu pada saat Cina memimpin sekitar sepertiga dari ekonomi dunia. Hal tersebut berarti Cina harus menjadi setidaknya dua kali lebih kuat dari Amerika Serikat pada tahun 2049 (Phillsbury, 2015).

Selain menjadi kepentingan nasional primer, kepentingan ekonomi Cina juga bersifat fleksibel. Kepentingan ekonomi Cina merupakan kepentingan nasional yang bersifat permanen namun juga bersifat temporer. Tahun 2049, Cina berambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar dari Amerika Serikat. Ambisi tersebut berarti menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia mengingat Amerika Serikat merupakan kekuatan ekonomi terbesar saat ini. Menurut (Zhao, 2016), komitmen tersebut berkaitan dengan bagaimana Cina mulai membuka diri dan memulai reformasi pada tahun 1970-an semenjak pemerintahan Deng

Xiaoping. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa Cina menempatkan kepentingan ekonomi sebagai prioritas secara konsisten dan permanen (dalam jangka waktu yang panjang) atau dapat disebut sebagai kepentingan jangka panjang (*long range objectives*).

Sedangkan dalam menjelaskan kepentingan ekonomi sebagai kepentingan nasional temporer dapat dilihat melalui *China's Five-Year Plans*. *China's Five Year Plans* (Rencana Lima Tahunan Cina) adalah inisiatif pemerintah Cina yang merupakan peninggalan dari ekonomi komando gaya Soviet (*Soviet-style command economy*). Rencana ini merupakan cetak biru mengenai target dan pedoman bagi berbagai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan lingkungan di Cina. Sementara ini, Cina telah melalui tiga dekade reformasi ekonomi yang berorientasi pasar dan rencana tersebut masih relevan hingga kini dan menjadi komponen kunci masyarakat Cina yang dikendalikan oleh negara dan direncanakan secara terpusat (Huang, 2015).

China's Five Year Plans sejatinya sudah dibentuk sejak zaman pemerintahan Mao Zedong. Setelah pemerintah komunis mengambil alih negara pada 1949, Cina melewati tiga tahun upaya pemulihan ekonominya. Hingga akhirnya pada tahun 1953 Cina memulai *Five-Year Plans* pertamanya untuk periode 1953 hingga 1957. Fokus utama rencana lima tahun pertama Cina tersebut ialah kemajuan pada sektor industri berat (Chen et al, 2016).

Terhitung sejak tahun 1953 hingga tahun 2015, Cina telah mengimplementasikan *Five Year Plans* tersebut sebanyak 12 kali. Tahun 2016 kemudian menjadi tahun pertama pengimplementasian *Five Year Plans* ke-13 (*China's 13th Five-Year Plans*) yang berlaku dari tahun 2016 hingga 2020. Rencana lima tahun pertama pada tahun 1953 lebih bertujuan untuk menetapkan tujuan spesifik dalam segala hal mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga produksi baja dan jumlah ternak. Saat itu pemerintah memutuskan segalanya, dari apa saja yang bisa dikonsumsi masyarakat sesuai dengan produksi yang sudah ditetapkan, bukan dari permintaan pasar. Namun seiring berjalannya waktu, arah dan tujuan dari rencana lima tahunan tersebut berubah. Neraca ekonomi pun berayun ke arah permintaan pasar dalam dekade terakhir dan pemerintah saat ini menyebut rencana lima tahunan tersebut sebagai "*Social and Economic Programme*" (Huang, 2015).

Rencana Lima Tahunan ke-13 ini menguraikan inisiatif strategis Cina dalam menetapkan tujuan, tugas, dan langkah-langkah utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Rencana ini berfungsi sebagai panduan dalam bertindak bagi entitas pasar, dasar penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan visi bersama untuk dibagikan kepada rakyat Cina (Central Committee of the Communist Party of China, 2016).

Rencana Lima Tahun ke-13 (FYP) (2016–2020) ini berupaya untuk mengatasi pertumbuhan yang tidak seimbang, tidak terkoordinasi, dan tidak berkelanjutan di Cina dan menciptakan masyarakat yang cukup makmur dalam segala hal melalui pertumbuhan yang inovatif, terbuka, hijau, terkoordinasi, dan inklusif. Agenda ini memperkuat peran Partai Komunis Cina dan pemerintah Cina dalam mengelola ekonomi sembari memungkinkan untuk mewujudkan peran yang lebih besar bagi pasar untuk menentukan alokasi sumber daya di beberapa sektor ekonomi (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2016).

Meskipun *Five Year Plans* yang dimiliki Cina terus berlanjut dari tahun ke tahun, penelitian ini akan berfokus dan menggarisbawahi tujuan dan target yang hendak dicapai oleh pemerintah Cina dalam jangka waktu lima tahun. Lebih tepatnya, penelitian ini akan berfokus pada *China's 13th Five Year Plans* yang berlangsung dari tahun 2016 lalu dan menghubungkannya dengan respon pemerintah Cina terhadap USTR Notorious Markets List pada tahun 2016 dan 2017.

Menurut (Aglietta & Bai, 2016), terdapat beberapa garis besar tujuan dari *China's 13th Five Year Plans* tersebut antara lain adalah *the shift from capital accumulation-led growth to innovation led-growth, spatial development, green development, inclusive development,*

financial and SOE reform dan opening up. Tujuan yang paling utama dari tujuan–tujuan tersebut ialah *the shift from capital accumulation-led growth to innovation led-growth.*

Pada 2015, penduduk perkotaan permanen di Cina menyumbang sebesar 56,1% dari total populasi. Infrastruktur membaik secara nyata dalam segala hal. Industri teknologi tinggi dan *strategic emerging industries* berkembang semakin cepat. Serta, sejumlah kemajuan tingkat dunia pun telah tercapai dalam bidang sains dan teknologi. Cina pun juga mendapatkan pencapaian baru bagi kekuatan ekonomi, kemampuan ilmiah, teknologi, kemampuan pertahanan, dan pengaruh internasional (Central Committee of the Communist Party of China, p.8, 2016).

Menurut (Hong, 2017), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sektor "prioritas tertinggi" di FYP ke-13. TIK merupakan sektor yang paling dinamis di Cina dan juga di seluruh dunia, terutama setelah jaringan protokol internet berkembang misalnya dari segi platform, layanan serta aplikasi. TIK yang berkembang, mulai dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), internet, hingga komputasi awan (*cloud computing*), diaktifkan dan diintegrasikan oleh Web untuk dapat memasuki ekonomi skala luas dan, dengan demikian menjanjikan adanya revolusi tekno-ekonomi lain di masa mendatang.

Pada lembar FYP ke-13 terdapat beberapa bagian yang membahas mengenai tujuan yang hendak dicapai pemerintah baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Pentingnya TIK bagi pemerintah Cina kemudian tertuang dalam bagian keenam yang mengatur mengenai *cyber-economy*. Singkatnya, bagian *cyber-economy* menjelaskan bagaimana inisiatif untuk memperluas ruang ekonomi berbasis internet. Bagian tersebut merupakan seruan untuk mengikuti tren teknologi yang ada, menerapkan *cyber power strategy*, mengintegrasikan TIK ke dalam segala aspek ekonomi dan sosial, serta mendukung perkembangan pesat ekonomi informasi (Hong, 2017).

Secara keseluruhan, pemerintah bermaksud untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif melalui modernisasi infrastruktur jaringan TIK. Mereka juga bermaksud untuk menciptakan industri baru yang berdasarkan atau berhubungan dengan TIK, sekaligus menggunakan TIK sebagai katalisator lintas sektoral yang dipergunakan untuk inovasi, modernisasi industri, dan peningkatan ekspor. Tidak hanya dari pemerintah Cina saja, akademisi dan rakyat Cina juga memandang perkembangan TIK perlu diperhatikan bagi kemajuan bangsa. Menurut Professor Hu Angang, Inovasi dan perkembangan digital memainkan peran utama di masa depan Cina. Lebih khususnya, perkembangan digital menjadi semakin penting bagi pedesaan di Cina terlihat melalui munculnya fenomena yang disebut "desa Taobao" yang mengacu pada pedesaan yang mendapat untung dari bisnis *e-commerce* lokal (Koetse, 2016).

E-commerce merupakan salah satu bentuk dari ekonomi digital (*digital economy*). Ekonomi digital diketahui berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Cina, khususnya pada PDB/GDP. Menurut (Xinhua, 2017), pada *World Internet Conference* (WIC) yang digelar di kota Wuzhen dilaporkan bahwa ekonomi digital Cina mencapai 22,58 triliun yuan (\$ 3,4 triliun) pada tahun 2016, menduduki peringkat kedua secara global dan menyumbang 30,3 persen bagi PDB nasional. Sekitar 22 % dari PDB dunia saat ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi digital yang mencakup teknik dan modal. Hal tersebut menunjukkan bagaimana kontribusi dan pentingnya ekonomi digital bagi Cina maupun bagi berbagai negara di dunia.

Pentingnya perekonomian digital bagi Cina pun dapat dilihat dalam pernyataan Presiden China yaitu Xi Jinping dalam pidatonya pada KTT B20 di Hangzhou, China yang digelar pada 3 September 2016. Pada pidato tersebut, Presiden Xi mengatakan bahwa ekonomi digital merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan pidato Xi yang menyebutkan "...*What we want to achieve is to seek impetus through innovation and vitality through reform. We need to seize the historic opportunity presented by innovation, new scientific and technological revolution,*

industrial transformation and digital economy to increase medium- and long-term growth potential of the world economy.” (Hangzhou B20 Summit, Xi Jinping, 2016).

Ekonomi digital masih tetap menjadi salah satu strategi prioritas Cina hingga tahun 2018. Pada Upacara pembukaan *China International Import Expo (CIIE)* yang pertama pada 5 November 2018 yang digelar di Shanghai, beliau mengatakan bahwa kesempatan yang diberikan oleh teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan pidato Xi yang menyatakan “...*We need to seize the opportunities presented by the new round of technological and industrial revolution, strengthen cooperation in frontier sectors such as digital economy, artificial intelligence and nanotechnology, and work together to foster new technologies, new industries, and new forms and models of business.*” (Shanghai, *China International Import Expo (CIIE)*, Xi Jinping, 2018).

Demi mendukung komitmennya terhadap ekonomi digital terutama pada sektor *e-commerce*, tiga departemen pemerintahan Cina mengeluarkan *13th Five Year Development Plan for E-commerce* pada Januari 2017. Ketiga departemen tersebut antara lain adalah *Ministry of Commerce, Office of the Central Leading Group for Cyberspace Affairs and National Development and Reform Commission*. Rencana tersebut berlaku untuk kurun waktu 2016 hingga 2020 dan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan mekanisme kerja guna kolaborasi antar-departemen dalam sektor *e-commerce*. *13th Five year Development Plan for E-commerce* ini merupakan bentuk rencana komplementer atau pelengkap bagi *China's 13th Five-Year Plans* yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, FYP *e-commerce* ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan lima tugas utama, yaitu mempercepat peningkatan dan peningkatan *e-commerce* selama Rencana Lima Tahun ke-13 periode (2016-2020), mempromosikan integrasi mendalam dari *e-commerce* dan industri tradisional, mengembangkan pasar *e-commerce* bagi faktor-faktor produksi, meningkatkan sistem *e-commerce* untuk layanan konsumen, dan mengoptimalkan lingkungan untuk tata kelola *e-commerce*. Selain itu, FYP *e-commerce* ini juga diharapkan dapat membantu dalam hal pemanfaatan internet, data besar (*big data*) dan teknologi informasi lainnya untuk dapat menguasai pasar *e-commerce*, menemukan dan menyelidiki pelanggaran undang-undang dan regulasi tepat waktu, dan membangun mekanisme pemerintahan serta mengatur sistem regulasi yang berlaku untuk pasar *e-commerce* (Information Office of the Ministry of Commerce, 2017).

IPR Protection Sebagai Promosi Kepentingan Ekonomi Cina

Sektor perekonomian terutama perdagangan, sejatinya memiliki hubungan erat dengan perlindungan *intellectual property rights (IPR Protection)*. Menurut (Curtis, 2012), suatu negara mungkin memiliki alasan ekonomi yang mendesak untuk mempertimbangkan perubahan hak kekayaan intelektual domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat dibuat sesuai dengan volume atau sifat dari arus perdagangan internasional yang ada. Alasan ekonomi ini, sebelumnya selalu terkait terutama dengan hak paten, tetapi semakin berkembangnya waktu alasan tersebut juga berlaku untuk hak cipta "era baru". Terlepas dari langkah-langkah kekayaan intelektual yang diperkuat tersebut dapat atau tidak dapat meningkatkan ekspor atau impor jasa, rezim kekayaan intelektual yang berfungsi dengan baik dapat mendorong lebih banyak investasi yang berfokus pada teknologi tinggi (*high technology*), dan khususnya akan berdampak pada meningkatnya impor barang dan jasa yang telah dilindungi, seiring dengan berkembangnya rantai pasokan regional dan global.

Dampak dari kekayaan intelektual terhadap inovasi, kreativitas, perdagangan internasional dan ekonomi secara lebih umum, tergantung pada keadaan yang tergolong unik dan pada sektor ekonomi tertentu, serta pada ukuran atau nilai dari hak kekayaan intelektual yang spesifik, di antara variabel-variabel lainnya. Faktor-faktor pengaruh tambahan lainnya termasuk potensi inovatif suatu negara, seperti kapasitas adaptasinya, tingkat pendidikan

tenaga kerjanya, struktur dan pendanaan penelitian dan pengembangan (Research & Development), manajemen aset dan institusi yang terlibat (Curtis, 2012).

Menurut (Ho, 2018). Cina berperan aktif dalam perlindungan kekayaan intelektual dikarenakan perekonomiannya yang bergeser ke ekonomi berbasis inovasi hampir setiap hari pada tahun 2017, sekitar 16.000 perusahaan baru terdaftar di Cina, dengan banyak dari mereka terlibat dalam industri inovatif yang menyumbang sebagian besar penelitian dan pengembangan yang dilakukan di negara tersebut. Bersama-sama dengan perusahaan Cina yang sudah mapan, termasuk Huawei di bidang telekomunikasi, Fosun dalam perawatan kesehatan, Medtronic dalam perangkat medis, dan BYD dalam bidang mobil, perusahaan-perusahaan ini kemudian mendorong pengembangan kekayaan intelektual baru yang dibuat di dalam negeri. Bahkan hanya dalam beberapa tahun, perusahaan pembuat smartphone yaitu Xiaomi telah mengambil alih industri ini. Selain itu juga ada Alibaba, perusahaan *e-commerce* terbesar di dunia.

Guna menuju ekonomi berbasis inovasi, Cina pun telah mengimplementasikan *15-year "Medium to Long Term Plan for the Development of Science and Technology"*. MLP tersebut menyerukan Cina untuk menjadi "masyarakat yang berorientasi pada inovasi" pada tahun 2020, dan menjadi pemimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2050 (Cao, 2006).

Pernyataan "Teknologi baru" dalam MLP tahun 2006-2020 tersebut terdiri dari bioteknologi TIK, ilmu nano dan nanoteknologi, *materials*, dan energi. Rencana tersebut mendorong para ilmuwan berbakat dan meningkatkan manajemen dan koordinasi penelitian teknologi. Bahkan pada tahun 2011, Cina berada di peringkat ke-29 di antara 125 negara pada tahun 2011 oleh Global Innovation Index yang mengukur kemampuan ekonomi terkait dengan input inovasi (institusi, sumber daya manusia, infrastruktur dan pasar, dan kecanggihan bisnis) dan indikator output (Kurtoğlu, 2015).

Made in China 2025 (MIC 2025) merupakan salah satu cetak biru dalam upaya pencapaian kepentingan ekonomi Cina sebagai kekuatan ekonomi global. Xi Jinping membuat strategi *Made in China 2025* (MIC 2025) sebagai proyek khas miliknya, yang mencerminkan betapa pentingnya perkembangan Cina di masa depan. Strategi ini menetapkan sepuluh industri inti, seperti robotika, peralatan listrik, dan teknologi informasi generasi mendatang, di mana Cina hendak mencapai terobosan besar dan menciptakan perusahaan yang berdaya saing global. Melalui rencana tersebut, Cina berharap untuk berhasil mengatasi *the middle income trap* serta mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing (Zenglein & Holzmann, 2019). MIC 2025 sangat berkaitan erat dengan kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan MIC 2025 bertujuan untuk menggunakan subsidi dari pemerintah, memobilisasi perusahaan milik negara, dan mengejar akuisisi kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mengejar ketinggalan dan melampaui kecakapan teknologi Barat di industri maju (McBride & Chatzky, 2019).

Secara garis besar, MIC 2025 menetapkan inovasi dan tujuan yang cukup agresif di bidang kekayaan intelektual yang hendak dicapai Cina pada tahun 2020. Tujuan tersebut antara lain yaitu menggandakan jumlah paten yang semula 6,3 menjadi 12 per setiap 10.000 orang, menggandakan jumlah aplikasi paten internasional yang semula 30.000 menjadi 60.000, meningkatkan royalti kekayaan intelektual yang diperoleh di luar negeri dari \$ 4,4 miliar menjadi \$ 10 miliar, dan meningkatkan pandangan positif dunia tentang perlindungan IP hingga 80% (Barkai, 2019).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang perlu ditingkatkan pun tercermin dalam pidato Presiden Xi Jinping dalam Boao Forum for Asia pada 10 April 2018 yang menyatakan "***Stronger IPR protection is the requirement of foreign enterprises, and even more so of Chinese enterprises. We encourage normal technological exchanges and cooperation between Chinese and foreign enterprises, and protect the lawful IPR owned by foreign enterprises in China***" (Ho, 2018). Pada tahun 2014, Cina mendirikan pengadilan

khusus kekayaan intelektual di Beijing, Shanghai dan Guangzhou. Sebelumnya, divisi khusus telah memimpin kasus yang terkait dengan kekayaan intelektual. Langkah tersebut menandai kemajuan yang penting bagi Cina dalam menangani pemalsuan dan memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih besar (Ho, 2018). Cina paham betul bahwa hal penting untuk mencapai tujuannya menjadi yang terdepan dalam bidang sains dan teknologi cerdas ialah dengan membentuk dan meningkatkan perlindungan hukum berkualitas tinggi bagi kekayaan intelektual (De Jonge, 2018).

KESIMPULAN

Menurut data yang telah didapatkan, respon yang diberikan pada kurun waktu 2016–2018 tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi Cina. Kepentingan ekonomi tersebut terutama ialah pada bagaimana upaya Cina untuk memulai ekonomi berbasis inovasi yang berdasarkan kepada keterbukaan (*openness*). Hal tersebut pun tercermin di dalam kebijakan Cina seperti *13th Five-Year Plans* serta *Made in China 2025*. Kebijakan–kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Cina sedang menuju kepada modernisasi ekonomi, salah satunya melalui ekonomi digital (*digital economy*). Salah satu raksasa *e-commerce* Cina yaitu Taobao–Alibaba Group, merupakan salah satu penggerak utama dalam praktik ekonomi digital dan menjadi salah satu nama yang tercantum dalam *USTR Notorious Market List*. Hal tersebut tentu saja memberikan hambatan bagi Cina sehingga Cina berusaha untuk melindungi salah satu kontributor utama dalam mencapai kepentingan ekonomi di era digital mereka melalui respon terhadap daftar “Notorious Markets” tersebut. Sesuai dengan argumen dari konsep kepentingan nasional, *Cina berusaha untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.*

Cina mulai membuka diri dan memulai reformasi pada tahun 1970-an semenjak pemerintahan Deng Xiaoping. Reformasi ini pun belum berakhir dan akan tetap berlanjut hingga di masa mendatang mengingat bagaimana ambisi Cina untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Cina sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sehingga memunculkan pemikiran bahwa guna mencapai kesejahteraan, maka sektor perekonomian harus tetap kuat dan stabil. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa Cina menempatkan kepentingan ekonomi sebagai prioritas secara konsisten dan permanen (jangka panjang). *Selain itu, dengan memberikan responnya tersebut Cina menunjukkan komitmennya terhadap penguatan dan perlindungan sistem HKI. Respon yang diberikan tersebut kemudian akan membentuk pandangan bahwa Cina juga peduli pada perlindungan sistem HKI namun juga perlu digarisbawahi bahwa Cina melakukan hal tersebut demi pemenuhan kepentingan nasionalnya.*

Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa respon yang diberikan oleh pemerintah Cina terhadap USTR Notorious Markets List didasari oleh kepentingan ekonominya. Tidak hanya semata–mata karena agenda kekayaan intelektual, namun respon tersebut merupakan dorongan dari tujuan Cina yang ingin menjadi negara dengan ekonomi berbasis inovasi, sesuai dengan kebijakan yang ada dalam kurun waktu 2016 – 2018 tersebut.

REFERENSI

- Aglietta, Michel & Guo Bai. 2016. *China’s 13th Five-Year Plan. In Pursuit of a “Moderately Prosperous Society”*. http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2016/pb2016-12.pdf
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar – Dasar Hubungan Internasional*, edisi pertama. Depok: Kencana

- Barkai, Joseph. 2019. *Made In China 2025 and Intellectual Property Rights*. Diakses Pada 20 Juni 2019. <http://joebarkai.com/made-in-china-2025-and-intellectual-property-protection/>.
- Brookings Institute. 1953. *Major Problems of United States' Foreign Policy*. Washington D.C: The Brookings Institution.
- Cao, Cong. 2006. *China's 15-year Science and Technology Plan*. https://www.researchgate.net/publication/242704112_China's_15-year_Science_and_Technology_Plan
- Central Committee of the Communist Party of China. 2016. *The 13th Five Year Plan For Economic and Social Development Of The People's Republic Of China (2016–2020)*. <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf>
- Chen, Donghua, Oliver Zhen Li & Fu Xin. 2016. *Five-year plans, China finance and their consequences*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309117300199?via%3Dihub>
- Curtis, John M. 2012. *Intellectual Property Rights and International Trade: An Overview*. <https://www.cigionline.org/sites/default/files/no.3.pdf>
- De jonge, Alice. 2018. *Why China is a leader in intellectual property (and what the US has to do with it)*. Diakses pada 22 juni 2019. <https://theconversation.com/why-china-is-a-leader-in-intellectual-property-and-what-the-us-has-to-do-with-it-93950>
- Ho, David. 2018. *IP Rising*. Diakses pada 3 Juli 2019. <http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/08/WS5b1a95bea31001b82571f058.html>
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, cetakan kedua. Bandung: Bina Cipta.
- Hong, Yu. 2017. *Reading the 13th Five-Year Plan: Reflections on China's ICT Policy*. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/6366/2007>
- Hongfei, Yue. 2017. *National Report on E-commerce Development in China*. United Nations. Industrial Development Organization (UNIDO). https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_17_2017.pdf.
- Huang, Cary. 2015. *How China's five-year plan, an overhang from the Soviet era, has evolved*. Diakses pada 3 Juli 2019. <https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1866736/how-chinas-five-year-plan-overhang-soviet-era-has>
- Information Office of the Ministry of Commerce. 2017. *13th Five-year Development Plan for E-commerce Issued by Three Departments*. Diakses pada 22 Juni 2019. <http://english.ipraction.gov.cn/article/Policies/201701/20170100121772.shtml>
- Koetse, Many. 2016. *Hu Angang: Digital is Key in China's 13th Five-Year Plan*. Diakses pada 20 Juni 2019. <https://www.whatsonweibo.com/huangangfiveyearplan/>
- Kurtoğlu, Yusuf. 2015. *China, From Catch-up Growth to Innovation-Driven Economy*. <https://pdfs.semanticscholar.org/d813/dfa4ae8789aae419842ca40e38c5376219e5.pdf>
- McBride, James & Andrew Chatzky. 2019. *Is 'Made in China 2025' a Threat to Global Trade?*. Diakses pada 28 Juni 2019. <https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade>
- Peterson Institute for International Economics. *National Economic Interest*. https://www.piie.com/publications/chapters_preview/6642/06iie6642.pdf
- Phillsbury, Michael. 2015. *The Hundred Year Marathon: China's Secret Strategy to replace America as the global superpower*, edisi kedua. New York: Henry Holt and Co.
- U.S-China Economic and Security Review Commission. 2016. *2016 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission*. https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/Executive%20Summary%202016.pdf

- Zenglein, Max J. & Anna Holzmann. 2019. *Evolving Made in China 2025: China's industrial policy in the quest for global tech leadership*. Diakses pada 28 Juni 2019. <https://www.merics.org/en/papers-on-china/evolving-made-in-china-2025>
- Zhao, Suisheng. 2016. *China as a Rising Power Versus the US-led World Order*. <http://risingpowersproject.com/wp-content/uploads/2016/07/vol1.1.Suisheng-Zhao.pdf>